

BEDAH RUMAH DIANGGAR RP 4,9 MILIAR

16.292 Rumah Tidak Layak Huni

WONOSARI (KR) - Meskipun setiap tahun dilakukan perbaikan, tetapi jumlah rumah tidak layak huni di Gunungkidul masih 16.292 unit. Untuk mengurangi jumlah tersebut tahun ini direncanakan perbaikan atau bedah rumah sebanyak 246 unit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Masing-masing rumah mendapatkan anggaran sebesar Rp 20 juta, dengan rincian Rp 17,5 juta stimulan material dan Rp 2,5 juta ongkos tukang. Sehingga anggaran perbaikan rumah jumlahnya sebesar Rp 4,92 miliar.

rumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPUPRKP) Gunungkidul Majid Efendi SE MSE, Selasa (4/3).

Untuk percepatan perbaikan rumah tidak layak huni, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setiap tahun melakukan program bedah rumah.

Untuk tahun 2024 sebanyak 24 unit diperbaiki. Namun untuk program tahun 2025 ini masih dalam proses pembahasan.

Menurutnya Suwarno SH, tim teknis bedah rumah, Baznas terus ber-

upaya meningkatkan peran perbaikan rumah selain membantu masyarakat bidang lain. Harapannya dapat mempercepat program pemerintah membuat masyarakat mempunyai tempat tinggal yang layak.

Di bagian lain, Masjid Efendi mengungkapkan, meski jumlah rumah tidak layak huni masih 16.292 unit, jumlah tersebut sudah turun dibanding program awal. "Awalnya sebanyak 21.758 yang harus diperbaiki," tambahnya.

(Ewi)



KR-Endar Widodo

Salah satu rumah tidak layak huni yang sudah dibedah Baznas Gunungkidul.

KIR Kendaraan Bermotor Gratis

WONOSARI (KR) - Setiap menjelang lebaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul akan melakukan pemeriksaan kelaikan dan kesiapan dalam beroperasi (ramcek) untuk menjamin keamanan kendaraan bagi penumpang yang akan berhari raya Idul Fitri.

Ramcek Dinas Perhubungan di Terminal tipe C Kapanewon Semin. Sedangkan untuk terminal tipe A Di Selang, Kapanewon Wonosari dilakukan sendiri oleh Badan Pengelola Transpotasi Darat (BPTD) DIY.

Selain ramcek tersebut, Dinas terus menyerukan agar para pemilik kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) untuk melakukan uji di Dinas Perhubungan. "Sejak 2024 uji kendaraan (KIR) gratis," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian

Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Gunungkidul Edy Suryanta AMa PKB SSos MAP, Selasa (4/3).

Tingkat kesadaran

pemilik Kendaraan bermotor wajib uji, katanya lebih lanjut, sangat rendah untuk mengujikan mobilnya. Jumlah yang seharusnya melakukan uji

KIR sebanyak 11.000 kendaraan, tetapi berdasar data pada tahun 2024 jumlah yang melakukan uji hanya 4.142 kendaraan yang berarti ada 6.858 kendaraan atau sekitar 63 persen kendaraan bodong KIR. Berbagai upaya mensosialisasikan pentingnya uji kendaraan terus dilakukan, tetapi kesadaran pemilik kendaraan tetap rendah. Tidak dikenakan biaya, tetapi tetap tidak ada yang datang. Rendahnya uji kendaraan ini, menurutnya, karena operasi yustisia tidak semasih sebelum Covid-19. Waktu itu operasi penertiban masuk pasar-pasar kapanewon, sehingga banyak yang mengujikan kendaraan. "Sekarang ini operasi yustisia kurang 10 kali setahun, terbatas di jalan-jalan nasional dan dekat kota," ujarnya.

(Ewi)



KR-Endar Widodo

Petugas melakukan uji kendaraan di UPTD PKB Dishub Gunungkidul

PC FATAYAT NU BERSAMA PBNU Bantu Stimulan Ekonomi Produktif ODPP



KR-Istimewa

Penyaluran bantuan kambing.

WONOSARI (KR) - Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Gunungkidul bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyalurkan bantuan stimulan ekonomi produktif bagi Orang Dengan Penyandang Psikososial (ODPP) di Kalurahan Siraman, Wonosari. Program ini bentuk kepedulian dengan ODPP dan *care giver*. Ketua PC Fatayat NU Gunungkidul

didikan dan pelatihan kader kesehatan jiwa dari seluruh kapanewon se-Kabupaten Gunungkidul. Agar embrio kegiatan ini dapat berdampak lebih luas.

"Nantinya akan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kader kesehatan jiwa," ujarnya.

Sementara Perwakilan PCNU Gunungkidul H Harsono MSI mengapresiasi bahwa Fatayat berada dalam garda terdepan dalam merespons berbagai kasus. Diharapkan enam ekor kambing bagi ODPP dan *care giver* dapat menjadi salah satu bentuk pemberdayaan bagi kaum rentan. "PCNU memberikan apresiasi program stimulan bagi ODPP. Karena sebagai bentuk pemberdayaan kaum rentan," jelasnya.

(Ded)

DATA BPBD SELAMA 2 BULAN

Bencana Hidrometeorologi 106 Kejadian

WONOSARI (KR) - Jumlah kejadian bencana alam akibat cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Gunungkidul selama dua bulan terakhir antara Januari hingga Februari 2025 cukup tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul mencatat terdapat sebanyak 106 kejadian. Terdiri dari bencana alam tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran gedung dan pemukiman serta pohon tumbang. Lokasi bencana tersebar hampir di seluruh kapanewon se-Gunungkidul. "Dari sebanyak 106 kejadian, terbanyak melanda wilayah Kapanewon Wonosari dengan total 58 kejadian yakni, 57 angin kencang dan pohon tumbang." Kata Kepala BPBD Gunungkidul Purwono.

Berdasarkan data bencana alam yang terjadi selama ini adalah bencana



KR-Bambang Purwanto

Rumah rusak tertimpa pohon terdampak bencana alam 2025.

hidrometeorologi yang ditandai dengan hujan lebat disertai angin kencang. Dari jumlah tingkat kerusakan terbanyak merusak atap rumah warga akibat tertimpa pohon tumbang. Selain itu juga berdampak terhadap menimpa rumah hunian maupun fasilitas umum dan di beberapa titik juga akses jalan terblokir pohon tumbang dan longsor. Angin kencang dan pohon tumbang mendominasi kejadian

bencana selama sebulan penuh dengan total kejadian mencapai 95 titik bencana. "encana tersebut terjadi di 10 kapanewon," ujarnya.

Ke-10 Kapanewon terdampak bencana tersebut yakni Girisubo 19 titik, Karangmojo 6 titik, Patuk 2 titik, Playen 2 titik, Pongjong 5 titik, Purwosari 1 titik, Semanu 1 titik, Tanjungjari 1 titik, Tepus 1 titik dan Wonosari 57 titik," jelasnya.

(Bmp)

BUMIL- BALITA DILAKUKAN PENDATAAN

MBG Ramadan, Menu Makanan Disesuaikan

WONOSARI (KR) - Komandan Kodim (Dandim) 0730 Gunungkidul, Letkol Inf Roni Hermawan menyatakan, selama bulan Ramadan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilaksanakan. Bahkan dapur sehat yang didirikan Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penyesuaian.

"Bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah pada menu yang akan dibagikan ke para siswa serta penerima manfaat lainnya. Hal ini disesuaikan dengan kondisi, mengingat saat ini merupakan bulan puasa dan sebagian siswa menjalankannya. Menu yang dipilih nanti-

nya adalah makanan yang tahan lama atau tidak basi sehingga bisa dikonsumsi saat waktu berbuka. Setiap harinya selalu ganti," kata Dandim 0730 Gunungkidul Letkol Inf Roni Hermawan, Senin (3/3).

Diungkapkan, nanti menu makanan diberikan kepada siswa penerima MBG seperti telur rebus, kurma, roti atau biskuit, susu dan lainnya. Untuk proses pendistribusian sendiri akan dilakukan pada siang hari sesuai dengan jam istirahat para pelajar. Petugas akan mengirimkan ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran penerapan MBG di



KR-Dedy EW

Letkol Inf Roni Hermawan

Kabupaten Gunungkidul.

"Konsepnya masih sama, nanti ada petugas yang mengantar ke masing-masing sekolah. Awal puasa ini kami tidak distribusi karena anak-anak kan libur, rencananya

pelaksanaan akan mulai lagi pada, Kamis (6/3)," ujarnya.

Untuk saat ini, Dapur Sehat milik BGN yang didirikan di kompleks Kodim 0730 WIB telah melayani 4 sekolah yang berada di wilayah Kota Wonosari yaitu SDN 1 Wonosari, SMPN 1 Wonosari, SMKN 3 Wonosari, dan SMAN 1 Wonosari. Sedangkan untuk dapur mandiri di Kapanewon Tepus melayani 3000 pelajar di wilayahnya.

"Sekarang sudah 4 sekolah, sedangkan untuk ibu hamil (bumil), ibu menyusui dan balita saat ini masih dilakukan pendataan," jelasnya.

(Ded)

2 RUAS JALAN RUSAK DIPERBAIKI

Dikebut Selesai Sebelum Lebaran

WONOSARI (KR) - Setelah lama ditunggu masyarakat, akhirnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (DPUPESDM) DIY melakukan perbaikan sejumlah jalan rusak di ruas jalan Wonosari- Karangmojo dan Playen-Paliyan. Perbaikan ini ditargetkan selesai sebelum bulan Ramadan agar masyarakat menikmati perjalanan lancar, aman dan tertib. "Setelah selesai ruas Wonosari- Karangmojo dan Playen-Paliyan akan dilanjutkan ke ruas lain Karangmojo-Semin misalnya," kata Tri Wibowo dari Bagian Pemeliharaan Bidang Sela Marga DPUPESDM DIY di sela-sela melakukan pengawasan, Selasa (4/3).

Ruas jalan yang ditambal sudah lama dikeluhkan masyarakat, selain mengganggu perjalanan, potensial terjadinya kecelakaan. Apalagi saat hujan lebat turun, lubang-lubang tersebut digenangi air, sehingga tidak terlihat bagi para pengguna jalan. Bagi warga yang terbiasa lewat, sudah mengenali jalan-jalan rawan tersebut, tetapi bagi pengguna jalan luar



KR-Endar Widodo

Penambalan jalan rusak di ruas Wonosari- Karangmojo titik jalan dekat jembatan Kelor

daerah tidak mengetahui. Titik jalan rusak Wonosari-Karangmojo yang sudah diperbaiki, dekat Balai Kalurahan Bendungan, di Wiladeg depan toko moderen, tikungan Kelor dan dekat jembatan. Menurut Tri Wibowo, pihaknya sudah melakukan eventarisasi jalan yang perlu dilakukan perbaikan. Tahap sekarang dua ruas jalan, dan akan terus dikembangkan sesuai dengan masalahnya dan anggaran

yang tersedia. Sementara Kepala Dinas PUPRKP Gunungkidul Ir Rakhmadian Wijayanto AP MSi meskipun kewenangan jalan propinsi kewenangan DIY, pihaknya juga selalu menyampaikan usulan jika ada jalan-jalan rusak untuk dilakukan perbaikan. Tidak hanya dengan DIY, untuk jalan nasional yang rusak juga dilaporkan ke Kementerian PU, jelasnya.

(Ewi)

TERKENDALA REGULASI BARU

Pencairan Dana Desa Molor dari Target

WONOSARI (KR) - Pencairan Dana Desa di Kabupaten Gunungkidul meleset dari rencana yang ditargetkan yang direncanakan karena terkendala adanya regulasi baru dalam Keputusan Menteri Desa No.3/2025 pada pertengahan Januari 2025 lalu. Semula ditargetkan pencairan dana desa termin pertama 2025 pada bulan Februari. Kendati demikian, target ini tidak bisa terealisasi karena hingga awal Maret belum ada satu kalurahanpun yang mencairkannya akibat terkendala regulasi. Semuka target pencairan serentak di 144 kalurahan pada Februari lalu, tapi hingga kini belum ada yang mencairkan. "Kalau target Pemerintah Pusat, paling lambat Juni, kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Khoiru Rahmat.

Dalam regulasi salah satu pasal dijelaskan bahwa ketentuan dalam program ketahanan pangan wajib dilaksanakan

melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

Peraturan ini memberikan dampak yang signifikan dalam proses pencairan. Pasalnya, saat peraturan turun, Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) di Gunungkidul sudah diketok dan untuk penanganan ketahanan pangan masih di ranah pemerintah kalurahan. Sehingga terjadi perbedaan nomenklatur pelaksanaannya.

"Makanya harus diubah terlebih dahulu agar proses pencairan bisa sesuai ketentuan," ujarnya.

Diakuinya saat ini sudah ada proses pendampingan untuk menyusun perubahan sesuai dengan yknis dari Kemendes No.3/2025 diperkirakan berlangsung sekitar satu bulan dan setelah itu bisa mengurus pencairan. Pagu dana desa untuk setiap kalurahan sudah ditentukan. ditetapkan sebesar Rp 168.808.759.000. Jumlah ini terdiri dari alokasi dasar Rp100.491.934.000 dan alokasi formula Rp 62.629.605.000.

(Bmp)